

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Unit Analisis/ Observasi**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari variabel independen yaitu Pajak Restoran, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Reklame terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta baik secara parsial maupun simultan. Pada penelitian ini, objek peneliti yang digunakan adalah data Penerimaan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah selama periode bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 (36 bulan). Data diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model persamaan regresi berganda dengan alat bantu program statistic SPSS 17 *for windows*. Data kemudian akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis statistik, yang sebelumnya harus memenuhi uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil pengolahan data berupa informasi mengenai apakah Pajak Restoran, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Reklame terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

#### **4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari data objek penelitian. Karakteristik data yang digambarkan dapat dilihat dari,

nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif yang diperoleh dengan program SPSS 17 dapat dilihat pada tabel 4.1, sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Hasil perhitungan analisis deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
% KINERJA KEU	36	48.78	65.31	57.3492	4.27931
% RESTORAN	36	4.95	8.29	6.6483	.88000
%BBN-KB	36	19.60	33.93	27.1242	3.51535
% REKLAME	36	1.24	3.28	2.0225	.52458
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Dinas Pelayanan Pajak yang telah diolah SPSS, 2013

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.1, maka diketahui bahwa jumlah sampel yang berhasil diobservasi adalah sebanyak 36 data pengamatan. Pada variabel Pajak Restoran yang diukur dengan analisis rasio kontribusi yang terendah yaitu 4,95% yang terjadi pada bulan November tahun 2011 dan nilai tertinggi sebesar 8,29% yang terjadi pada bulan Januari tahun 2009. Hal ini memiliki arti bahwa Pajak Restoran pada bulan November tahun 2011 penerimaan Pajak Restoran paling rendah sehingga memiliki kontribusi yang rendah bila dibandingkan dengan periode-periode yang lain. Penerimaan yang rendah ini disebabkan karena pada akhir tahun, banyak warga Jakarta yang memilih menghabiskan liburan mereka ke luar kota, yang mengakibatkan pendapatan Restoran di Jakarta mengalami penurunan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya serta adanya target penerimaan Pajak Restoran yang tinggi di bulan tersebut sehingga kontribusi Pajak Restoran menjadi lebih kecil. Sedangkan pada

bulan Januari tahun 2009 Pajak Restoran memiliki penerimaan yang paling besar sehingga menyumbang kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Nilai rata-rata Pajak Restoran periode Januari 2009 – Desember 2011 yaitu 6,6483% dengan standar deviasi sebesar 0,88000 yang menunjukkan variasi data Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dilihat dari rasio kontribusinya.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang diukur menggunakan analisis rasio kontribusi yang terendah sebesar 19,60% yang terjadi pada bulan Mei tahun 2009 dan angka tertinggi sebesar 33,93% yang terjadi pada bulan April tahun 2010. Hal ini memiliki arti bahwa Penerimaan BBN-KB pada bulan Mei tahun 2009 memiliki penerimaan terendah sehingga menyumbang kontribusi yang sedikit bagi Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pada bulan April tahun 2010 Penerimaan BBN-KB lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode lain sehingga menyumbang kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian nilai rata-rata BBN-KB sebesar 27,1242% dengan standar deviasi 3,51535 yang menunjukkan variasi Penerimaan BBN-KB terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dilihat dari rasio kontribusinya.

Pajak Reklame yang diukur menggunakan analisis rasio kontribusi yang terendah sebesar 1,24% yang terjadi pada bulan September tahun 2011 dan angka tertinggi sebesar 3,28% yang terjadi pada bulan Desember tahun 2009. Hal ini memiliki arti bahwa Penerimaan Pajak Reklame pada bulan September 2011 memiliki penerimaan terendah sehingga menyumbang kontribusi yang sedikit bagi Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan

struktur organisasi pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan mulai dibentuknya Unit Pelayanan Pajak Daerah yang berada di lingkup Kecamatan. Peralihan ini mengakibatkan terjadinya pelimpahan wewenang dan berkas-berkas wajib pajak sehingga upaya peningkatan penerimaan menjadi tidak optimal. Sedangkan pada bulan Desember tahun 2009 Penerimaan Pajak Reklame lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode lain sehingga menyumbang kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena dibentuknya UPT Pemeriksaan Pajak Reklame yang bertugas untuk melakukan upaya pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame yang mengakibatkan penerimaan Pajak Reklame mengalami peningkatan. Kemudian nilai rata-rata Pajak Reklame sebesar 2,0225% dengan standar deviasi 0,52458 yang menunjukkan variasi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dilihat dari rasio kontribusinya.

Kinerja Keuangan Provinsi DKI Jakarta yang diukur Rasio Kemandirian memiliki persentase terendah sebesar 48,78% yang terjadi pada bulan September tahun 2009 dan persentase tertinggi sebesar 65,31% yang terjadi pada bulan November tahun 2011. Hal ini memiliki arti bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada bulan September tahun 2009 memiliki penerimaan terendah sehingga menyumbang kontribusi yang sedikit bagi Pendapatan Daerah secara keseluruhan, yang berarti bahwa tingkat kemandirian pada September 2009 adalah rendah bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Sedangkan pada bulan November tahun 2011 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode lain sehingga menyumbang kontribusi yang

besar terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Daerah sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah sehingga di bulan November 2011, tingkat kemandirian Jakarta paling tinggi jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nilai rata-rata Kinerja Keuangan Provinsi DKI Jakarta sebesar 57,3492% dengan standar deviasi 4,27931 yang menunjukkan variasi Kinerja Keuangan Daerah DKI Jakarta yang dilihat dari rasio kemandirian.

#### 4.2.2. Asumsi Klasik

Model regresi ini digunakan agar dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yakni data terdistribusi secara normal, tidak terdapat multikolinieritas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas.

##### 4.2.2.1. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Sehingga, uji normalitas bertujuan untuk melihat model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan analisis skewnes kurtosis. Peneliti menggunakan uji normalitas ini karena jenis penelitian merupakan statistik inferensial parametris yang mana digunakan untuk menganalisis data rasio dari populasi yang terdistribusi normal, sehingga persebaran normal data sudah cukup terlihat dari analisis Skewnes Kurtosis. Setelah dilakukan uji normalitas tersebut, hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2  
Hasil Perhitungan Skewness dan Kurtosis  
**Descriptive Statistics**

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
% KINERJA KEU	36	.053	.393	-.556	.768
% RESTORAN	36	-.253	.393	-.423	.768
%BBN-KB	36	.017	.393	-.138	.768
% REKLAME	36	.485	.393	-.607	.768
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Dinas Pelayanan Pajak yang telah diolah SPSS

Berdasarkan hasil uji yang terdapat pada tabel 4.2 diatas, diketahui nilai z statistik sebagai berikut :

$$Z \text{ skewness} = \frac{0,053}{\sqrt{(6/36)}} = 0,1298$$

$$Z \text{ kurtosis} = \frac{-0,556}{\sqrt{(24/36)}} = -0,6809$$

Nilai Z skewness sebesar 1,298 dan Z kurtosis sebesar -0,6809 nilai ini ada diantara -1,96 sampai dengan 1,96. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

#### 4.2.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Berikut adalah hasil uji Multikolinieritas yang terdapat pada tabel 4.3, 4.4, dan 4.5 berikut :

Tabel 4.3  
Hasil uji Multikolinearitas

Model		% REKLAME	%BBN-KB	% RESTORAN	
1	Correlations	% REKLAME	1.000	.119	-.511
		%BBN-KB	.119	1.000	-.016
		% RESTORAN	-.511	-.016	1.000
Covariances	% REKLAME	1.404	.021	-.425	
	%BBN-KB	.021	.023	-.002	
	% RESTORAN	-.425	-.002	.492	

a. Dependent Variable: % KINERJA KEU

Sumber : Data Dinas Pelayanan Pajak yang telah diolah SPSS

Tabel 4.4  
Hasil uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	83.452	5.922		14.091	.000		
	% RESTORAN	-2.147	.701	-.442	-3.062	.004	.737	1.357
	%BBN-KB	-.208	.152	-.171	-1.370	.180	.983	1.017
	% REKLAME	-3.055	1.185	-.374	-2.578	.015	.727	1.376

a. Dependent Variable: % KINERJA KEU

Sumber : Data Dinas Pelayanan Pajak yang telah diolah SPSS

Tabel 4.5  
Hasil uji Multikolinearitas

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	% RESTORAN	%BBN-KB	% REKLAME
1	1	3.935	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.048	9.061	.01	.00	.09	.60
	3	.012	17.955	.01	.58	.40	.39
	4	.005	27.502	.98	.42	.51	.00

a. Dependent Variable: % KINERJA KEU

Sumber : Data Dinas Pelayanan Pajak yang telah diolah SPSS

Melihat hasil uji pada tabel 4.4 diatas terlihat besaran korelasi antar variabel independen menunjukkan bahwa hanya variabel Pajak Restoran yang memiliki korelasi cukup tinggi dengan variabel Reklame dengan tingkat korelasi -0,511

atau sekitar 51,1% karena korelasi ini masih dibawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi Multikolinieritas yang serius.

Hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

#### 4.2.2.3. Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW) untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Berikut adalah tabel 4.6 mengenai hasil uji DW .

Tabel 4.6  
Hasil perhitungan Durbin Watson

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.714 <sup>a</sup>	.510	.464	3.13430	1.700

a. Predictors: (Constant), % REKLAME, %BBN-KB, % RESTORAN

b. Dependent Variable: % KINERJA KEU

Sumber : Data Dinas Pelayanan Pajak yang telah diolah SPSS

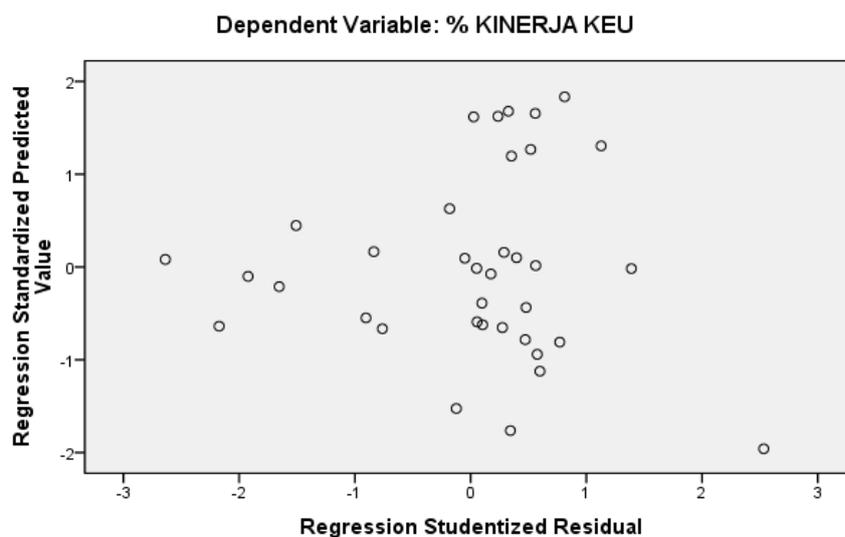
Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diketahui Nilai DW sebesar 1,700, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel adalah 36 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka di tabel Durbin

Watson akan didapatkan nilai tabel sebesar 1,6539. Oleh karena nilai DW 1,700 lebih besar dari batas atas Du 1,6539 dan kurang dari  $(4 - 1,6539)$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan scatter plot dan uji Gleijser. Berikut adalah gambar 4.1 yang menggambarkan hasil uji Scatterplot :

Gambar 4.1  
Grafik Scatterplot



Sumber : Data Dinas Pelayanan Pajak yang telah diolah SPSS

Grafik scatter plot pada gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Selain uji scatterplot, dilakukan pula uji gleijser. Berikut adalah hasil perhitungan uji gleijser yang terdapat dalam tabel 4.7 :

Tabel 4.7  
Hasil perhitungan Uji Gleijser  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.441	4.030		.357	.723
	% RESTORAN	.025	.477	.010	.051	.959
	%BBN-KB	-.041	.103	-.069	-.397	.694
	% REKLAME	.804	.806	.201	.997	.326

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber : Data Dinas Pelayanan Pajak yang telah diolah SPSS

Tabel 4.7 tentang hasil uji Gleijser diatas menunjukkan bahwa nilai t lebih besar atau diatas 0,05. Dari hasil scatter plot dan uji Gleijser diatas, dapat disimpulkan disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4.2.3. Pengujian Hipotesis

##### 4.2.3.1. Model Regresi Berganda

Hasil pengujian asumsi klasik diketahui bahwa semua asumsi yang mendasari analisa regresi linier berganda antara variabel bebas (Pajak Restoran, BBN-KB dan Pajak Reklame) terhadap variabel terikat (Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta) terpenuhi, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisa regresi linear berganda. untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Maka persamaan regresi setelah diolah dalam spss sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Keuangan DKI Jakarta} = 83,452 - 2,147 \text{ Pajak Restoran} - 0,208 \text{ BBN-KB} - 3,055 \text{ Pajak Reklame}$$

Hasil pengolahan data hasil persamaan regresi berganda yang dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8  
Hasil Persamaan Regresi Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	83.452	5.922		14.091	.000
	% RESTORAN	-2.147	.701	-.442	-3.062	.004
	%BBN-KB	-.208	.152	-.171	-1.370	.180
	% REKLAME	-3.055	1.185	-.374	-2.578	.015

a. Dependent Variable: % KINERJA KEU

Sumber : Data Dinas Pelayanan Pajak yang telah diolah SPSS

Berdasarkan persamaan regresi dan tabel 4.8 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta (a) sebesar 83,452 artinya jika semua variabel independen (Pajak Restoran, BBN-KB, dan Pajak Reklame) dalam model regresi nilainya adalah 0 (konstan), maka kinerja keuangan Prov. DKI Jakarta akan mengalami kenaikan sebesar 83,452.
- b. Koefisien regresi variabel Pajak Restoran sebesar -2,147 hal ini berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai Pajak Restoran mengalami kenaikan sebesar 1, maka nilai kinerja keuangan Prov. DKI Jakarta akan mengalami penurunan sebesar 2,147 begitu pula sebaliknya, apabila nilai Pajak Restoran mengalami penurunan sebesar 1, maka nilai kinerja keuangan Prov. DKI Jakarta akan mengalami kenaikan sebesar 2,147.
- c. Koefisien regresi variabel BBN-KB sebesar -0,208 hal ini berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai BBN-KB mengalami kenaikan sebesar 1, maka nilai kinerja keuangan Prov. DKI Jakarta akan mengalami penurunan sebesar 0,208 begitu pula sebaliknya, apabila nilai BBN-KB

mengalami penurunan sebesar 1, maka nilai kinerja keuangan Prov. DKI Jakarta akan mengalami kenaikan sebesar 0,208.

- d. Koefisien regresi variabel Pajak Reklame sebesar -3,055 hal ini berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai Pajak Reklame mengalami kenaikan sebesar 1, maka nilai kinerja keuangan Prov. DKI Jakarta akan mengalami penurunan sebesar 3,055 begitu pula sebaliknya, apabila nilai Pajak Reklame mengalami penurunan sebesar 1, maka nilai kinerja keuangan Prov. DKI Jakarta akan mengalami kenaikan sebesar 3,055.

#### 4.2.3.2. Uji Parsial (t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan untuk memeriksa lebih lanjut manakah diantara kedua variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Uji t dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan pengujian 2 sisi (signifikan=0,05), maka hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2,01290. Berdasarkan hasil penelitian ini, dari ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model dengan signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa hanya 2 variabel independent (Pajak restoran dan Pajak Reklame) yang berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. Berikut adalah hasil perhitungan Uji t yang dapat dilihat pada tabel 4.9 :

Tabel 4.9  
 Hasil perhitungan Uji t  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	83.452	5.922		14.091	.000
	% RESTORAN	-2.147	.701	-.442	-3.062	.004
	%BBN-KB	-.208	.152	-.171	-1.370	.180
	% REKLAME	-3.055	1.185	-.374	-2.578	.015

a. Dependent Variable: % KINERJA KEU

Sumber : Data Dinas Pelayanan Pajak yang telah diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh Pajak Restoran terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $3.062 > t_{tabel} 1,69$  dengan tingkat signifikansi  $0,04 < 0,05$ . Dilihat dari tingkat signifikansi, Pajak Restoran berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- b. Berdasarkan pengujian secara parsial BBN-KB terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $2,578 < t_{tabel} 1,69$  dengan tingkat signifikansi  $0,180 > 0,05$ . Dilihat dari tingkat signifikansi, BBN-KB tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
- c. Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh Pajak Reklame terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $2,027 > t_{tabel} 1,679$  dengan tingkat signifikansi  $0,015 < 0,05$ . Dilihat dari tingkat signifikansi, Pajak Reklame berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

#### 4.2.3.3. Uji F

Uji F digunakan untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan ada pengaruh simultan antara Pajak Restoran, BBN-KB dan Pajak Reklame terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2009-2011. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan  $f_{hitung}$  dengan  $f_{tabel}$ , dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan pengujian 2 sisi (signifikan=0,05), maka hasil diperoleh untuk  $F_{tabel}$  sebesar 2,90. Hasil perhitungan Uji F dapat dilihat pada tabel 4.10 :

Tabel 4.10  
Hasil perhitungan Uji F

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	326.573	3	108.858	11.081	.000 <sup>a</sup>
	Residual	314.364	32	9.824		
	Total	640.937	35			

a. Predictors: (Constant), % REKLAME, %BBN-KB, % RESTORAN

b. Dependent Variable: % KINERJA KEU

Sumber : Data Dinas Pelayanan Pajak yang telah diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa pengujian hipotesis secara simultan menghasilkan  $F_{hitung}$  sebesar 11,081 dengan signifikansi 0,05. Nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $11,081 > 2,90$  dan taraf signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dilihat dari hasil tersebut dapat diartikan model regresi linear berganda layak digunakan dalam penelitian ini serta adanya pengaruh variabel independen Pajak Restoran, BBN-KB dan Pajak Reklame terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai variabel dependen secara simultan.

#### 4.2.3.4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Hasil dari perhitungan koefisien determinasi tertuang pada tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11  
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.714 <sup>a</sup>	.510	.464	3.13430

a. Predictors: (Constant), % REKLAME, %BBN-KB, % RESTORAN

Sumber : Data Dinas Pelayanan Pajak yang telah diolah SPSS

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, besarnya *adjusted*  $R^2$  adalah 0.464, hal ini berarti 46,4% variasi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu Pajak Restoran, BBN-KB, dan Pajak Reklame, sedangkan sisanya ( $100\% - 46,4\% = 53,6\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain diluar ketiga variabel independen diatas. Hal ini dapat disebabkan bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selain Pajak Restoran, BBN-KB, dan Pajak Reklame yang tidak dijadikan objek penelitian seperti jenis pajak daerah lainnya, anggaran belanja modal, dan sebagainya.

#### 4.2.4. Pembahasan Hasil Penelitian

##### 4.2.4.1. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Kinerja Keuangan Provinsi DKI Jakarta

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menguji pengaruh Pajak Restoran dengan Kinerja Keuangan Daerah dengan menggunakan rasio kemandirian daerah. Hasil dari uji t Pajak Restoran memiliki nilai sig sebesar 0,004 nilai tersebut menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini berarti Hipotesis 1 diterima.

Pajak Restoran memiliki koefisien regresi sebesar -2,147 yang menandakan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti setiap ada penambahan Pajak Restoran maka akan berpengaruh pada penurunan kinerja keuangan daerah dan setiap ada penurunan Pajak Restoran maka akan berpengaruh pada kenaikan kinerja keuangan. Temuan ini dapat dilihat pada salah satu data penelitian, yaitu pada bulan September 2011 dimana Pajak Restoran mengalami kenaikan namun Kinerja Keuangan Daerah mengalami penurunan, dan sebaliknya yaitu pada bulan November 2011 yang merupakan penerimaan terendah dari Pajak Restoran namun mengakibatkan Kinerja Keuangan Daerah mengalami kenaikan sehingga mencapai angka tertinggi.

Pengaruh negatif Pajak Restoran terhadap Kinerja Keuangan Daerah disebabkan karena setiap kenaikan dari Pajak restoran tidak diimbangi dengan kenaikan dari jenis Pajak Daerah yang lain sehingga meskipun secara kontribusi Pajak Restoran meningkat, namun apabila dilihat dari target penerimaan pajak

daerah secara keseluruhan mengalami penurunan sehingga secara rasio kemandirian daerah yang diketahui dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah pun menurun dan mengakibatkan Kinerja Keuangan Daerah mengalami penurunan pula.

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat Jakarta sebagai wajib pajak restoran sangatlah tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Pardi dan Dwi Handayani dalam jurnal yang berjudul, “Pengaruh faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran (Studi Empiris Wajib Pungut Restoran di Surakarta). Jurnal tersebut mengemukakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak restoran memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang memiliki potensi restoran yang paling besar dibandingkan daerah lain, serta adanya regulasi yang mengatur, membuat tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi sebagai wajib pajak restoran, hal ini berbeda dengan penelitian Nanik Wahyuni dalam jurnal yang berjudul “Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang”, disimpulkan bahwa tingkat kemandirian kota Malang kurang baik, hal ini disebabkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, serta rendahnya partisipasi masyarakat kota Malang. Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2012 :28) berpendapat bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, antara lain :

1. Meningkatkan basis data untuk mengidentifikasi kembali semua wajib pajak.

2. Menggiring wajib pajak untuk lebih taat membayar pajak dan retribusi melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Atau memberikan reward kepada wajib pajak yang taat.
3. Perbaiki sistem akuntansi dalam proses penerimaan pendapatan, sebab sangat rawan kebocoran pada dinas-dinas terkait.
4. Meningkatkan sumber daya pegawai di dinas yang berhubungan dengan pendapatan untuk memaksimalkan kinerja mereka.

Dinas Pelayanan Pajak sebagai pemungut pajak daerah Provinsi DKI telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak restoran, beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain :

1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak secara rutin, sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan
2. Pemberian sanksi berupa denda bagi keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak restoran
3. Aktif melakukan pendataan lapangan sehingga selalu memperbaharui basis data

Upaya-upaya tersebut membuat tingkat kepatuhan wajib pajak Restoran meningkat karena sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 diatur mengenai sanksi denda atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak restoran serta sanksi denda atas ketidakbenaran dalam menyetor dan melaporkan pajak restoran.

Upaya peningkatan penerimaan Pajak Restoran yang dilakukan secara maksimal hendaknya tidak membuat potensi penerimaan dari jenis pajak daerah

lain mengalami penurunan, agar peningkatan penerimaan Pajak Restoran dapat diimbangi dengan penerimaan pajak daerah lain. Sehingga target penerimaan Pajak daerah secara keseluruhan dapat tercapai dan meningkatkan kinerja keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta.

#### 4.2.4.2. Pengaruh BBN-KB Terhadap Kinerja Keuangan Provinsi DKI Jakarta

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menguji pengaruh BBN-KB dengan Kinerja Keuangan Daerah dengan menggunakan rasio kemandirian daerah. Hasil dari uji t BBN-KB memiliki nilai sig sebesar 0,180 nilai tersebut menunjukkan bahwa BBN-KB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini berarti hipotesis 2 ditolak.

BBN-KB tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dalam hal ini tingkat partisipasi masyarakat dalam penerimaan BBN-KB sangatlah rendah sehingga tidak mempengaruhi kinerja keuangan DKI Jakarta. Rendahnya partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak BBN-KB dapat disebabkan karena pemerintah daerah DKI Jakarta belum menerapkan manajemen pendapatan yang baik dalam pengawasan penerimaan BBN-KB. Jumlah penerimaan BBN-KB yang besar dikarenakan pengenaan tarif dan dasar penentuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) DKI Jakarta yang tinggi. Sesuai dengan Peraturan daerah No. 9 Tahun 2010, objek dari BBN-KB adalah penyerahan atau pengalihan hak milik kendaraan bermotor, oleh karena itu tinggi rendahnya penerimaan BBN-KB

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti yang dikatakan oleh Haula Rosdiana dalam jurnal yang berjudul “Menggagas Model Proyeksi Penerimaan PKB dan BBN-KB”, bahwa faktor yang mempengaruhi BBN-KB antara lain :

1. Daya beli masyarakat, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, tingkat penjualan juga dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Karena itu, tingkat daya beli seharusnya menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB. Jika daya beli masyarakat meningkat, maka kemampuan untuk membeli kendaraan bermotor juga meningkat dan potensi penerimaan BBNKB juga akan meningkat.
2. Jumlah ruas jalan dan tingkat kemacetan, salah satu penyebab kemacetan, akibat tidak seimbangnya antara pertumbuhan ruas jalan dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang menyebabkan densitas. Karena itu, untuk mengatasi masalah kemacetan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan transportasi, yang pada akhirnya mempunyai implikasi negatif terhadap penerimaan PKB dan BBNKB.
3. Kebijakan publik untuk mengurangi laju pertumbuhan kendaraan, kebijakan publik untuk mengurangi laju pertumbuhan kendaraan bermotor merupakan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Seringkali antara satu tujuan atau kepentingan berbenturan dengan yang lain. PKB dan BBNKB masih menjadi idola penerimaan pajak daerah tentunya tidak bisa dipungkiri lagi. Namun kemacetan Yang luar biasa, pada akhirnya justru kontraproduktif karena menyebabkan kerugian ekonomi yang jumlahnya dalam kisaran triliunan. Tentu dapat dipahami jika pemerintah DKI Jakarta kemudian membuat

kebijakan-kebijakan yang sepertinya Tidak mendukung pertumbuhan jumlah kendaraan, atau berencana mengeluarkan kebijakan guna mengurangi laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Misalnya kebijakan penerapan kendaraan bermotor dengan nomor polisi ganjil atau genap secara bergiliran, serta pembatasan umur kendaraan.

4. Migrasi penduduk ke pinggiran Jakarta, meskipun secara empiris belum terbukti mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta. Namun demikian data belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah kab/kota, khususnya belanja bagi hasil PKB/ BBNKB untuk daerah-daerah pinggiran Jakarta seperti Depok, Bogor dan Bekasi, cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator bahwa migrasi penduduk ke pinggiran Jakarta mempunyai implikasi terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. Terlebih dengan ditegakkannya penerapan asas domisili kepemilikan kendaraan bermotor, menyebabkan kecenderungan Wajib Pajak memilih meregistrasikan kendaraannya di tempat domisili.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak BBN-KB, diantaranya adalah :

1. Pemberlakuan tarif pajak progresif bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat yang melakukan pembelian kendaraan bermotor bekas enggan melakukan balik nama apabila mereka telah memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu karena akan mengakibatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka menjadi lebih besar.

2. Besarnya biaya yang dilakukan untuk mengurus balik nama kendaraan. Banyaknya calo maupun agensi/ biro jasa yang menawarkan biaya tinggi serta maraknya informasi di media massa yang memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kepengurusan balik nama yang berbelit-belit mengakibatkan masyarakat menjadi enggan mengurus balik nama kendaraan bermotor mereka.
3. Sistem pemungutan pajak yang merupakan "*self assesment*" membuat pemungut pajak kurang melakukan pengawasan sebab sulit untuk mengetahui transaksi jual beli kendaraan bermotor, khususnya jual beli kendaraan bekas. Seperti yang telah diketahui bahwa dasar pengenaan BBN-KB adalah adanya transaksi jual beli kendaraan bermotor, dan sulit bagi aparat pemungut pajak untuk mengetahui adanya transaksi jual beli kendaraan bermotor khususnya jual beli kendaraan bekas.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta dari tahun ke tahun membuat BBN-KB menjadi salah satu primadona bagi Penerimaan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Namun, besarnya kontribusi penerimaan BBN-KB tersebut tidak menggambarkan besarnya partisipasi masyarakat dalam mengukur kinerja keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta. Banyaknya jumlah kendaraan yang ada juga memiliki dampak negatif bagi DKI Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk tetap bisa meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator baik atau tidaknya kinerja keuangan daerah dengan meminimalisasi resiko yang mungkin terjadi atas pemungutan BBN-KB ini.

#### 4.2.4.3. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Kinerja Keuangan Provinsi DKI Jakarta

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menguji pengaruh Pajak Reklame dengan Kinerja Keuangan Daerah dengan menggunakan rasio kemandirian daerah. Hasil dari uji t Pajak Reklame memiliki nilai sig sebesar 0,015 nilai tersebut menunjukkan bahwa Pajak Reklame memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini berarti hipotesis 3 diterima.

Pajak Reklame memiliki koefisien regresi sebesar -3,055 yang menandakan bahwa Pajak Reklame memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti setiap ada penambahan Pajak Reklame maka akan berpengaruh pada penurunan kinerja keuangan daerah dan setiap ada penurunan Pajak Reklame maka akan berpengaruh pada kenaikan kinerja keuangan. Temuan ini dapat dilihat pada salah satu data penelitian, yaitu pada bulan Desember tahun 2009 dimana presentase kontribusi Pajak Reklame mengalami kenaikan namun Kinerja Keuangan daerah mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena pada bulan tersebut realisasi Penerimaan total PAD mengalami penurunan, sehingga peningkatan dari Pajak Reklame tidak membuat Kinerja Keuangan Daerah mengalami peningkatan.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Adanya pengaruh Pajak Reklame terhadap kinerja keuangan daerah disebabkan karena adanya partisipasi aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak reklame. Pada jurnal karya Sri Wartini

yang berjudul “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung” dengan objek penelitian Kota Bandung periode tahun 2005 sampai dengan 2009. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. DKI Jakarta merupakan kota sentra bisnis yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha sehingga angka pertumbuhan ekonomi di Jakarta relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Oleh karenanya, potensi pajak reklame pun cukup besar dibandingkan dengan daerah lain.

Abdul halim dan Muhammad Iqbal (2012 :27) mengatakan bahwa dibutuhkan manajemen pendapatan agar setiap daerah dapat memahami potensi pendapatan mereka dan juga dapat memaksimalkan pendapatan mereka untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Dinas Pelayanan Pajak selaku pemungut pajak di DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame, diantaranya adalah :

1. Mengirim surat pemberitahuan jatuh tempo bagi reklame yang masa berlaku izin penelenggaraannya hampir habis
2. Mengirim surat klarifikasi terhadap reklame yang belum daftar ulang dan reklame yang belum terdaftar
3. Mengirim surat peringatan bagi penyelenggara reklame yang tidak mau membayar kewajiban perpajakan
4. Melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap reklame liar dan reklame yang belum daftar ulang

5. Mengundang para biro penyelenggara reklame untuk acara sosialisasi peraturan pajak daerah

Adanya upaya-upaya tersebut, membuat wajib pajak reklame menjadi aktif dalam penerimaan pajak reklame. Upaya peningkatan penerimaan Pajak Reklame yang dilakukan secara maksimal hendaknya tidak membuat potensi penerimaan dari jenis pajak daerah lain mengalami penurunan, agar peningkatan penerimaan Pajak Reklame dapat diimbangi dengan penerimaan pajak daerah lain. Sehingga target penerimaan Pajak daerah secara keseluruhan dapat tercapai dan meningkatkan kinerja keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta.

#### 4.2.4.4. Pengaruh Pajak Restoran, BBN-KB dan Pajak Reklame Terhadap Kinerja Keuangan Provinsi DKI Jakarta

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menguji pengaruh Pajak Restoran, BBN-KB, dan Pajak Reklame dengan Kinerja Keuangan Daerah dengan menggunakan rasio kemandirian daerah. Hasil dari uji simultan (F) diketahui memiliki nilai sig sebesar 0,000 nilai tersebut menunjukkan bahwa Pajak Restoran, BBN-KB, dan Pajak Reklame secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dengan koefisien determinasi sebesar 46,4%. Hal ini berarti hipotesis 4 diterima. Berikut adalah tabel 4.12 yang menunjukkan pedoman dalam melihat hubungan dengan kemampuan keuangan daerah :

Tabel 4.12

## Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber : Jurnal Karya Mega Pratidina

Adanya pengaruh ketiga variabel independen yaitu Pajak Restoran, BBN-KB, dan Pajak Reklame yang secara simultan memiliki pengaruh sebesar 46,4%, berdasarkan tabel 4.12 diatas, nilai ini menunjukkan tingkat kemandirian Provinsi DKI Jakarta yang masih rendah dengan pola hubungan konsultatif. Pola hubungan konsultatif menandakan bahwa intervensi Pemerintah Pusat sedikit demi sedikit mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi (Josef Riwu Kaho, 2012 : 292).

Hasil penelitian ini sama hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Usman, dalam jurnal dengan judul “Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo”, yang menyimpulkan bahwa PAD Gorontalo masih memberikan kontribusi yang rendah sehingga tingkat kemandirian daerah Gorontalo masih rendah, begitu pula dengan hasil penelitian Mega Pratidina yang berjudul “Kinerja Keuangan Pemerintah Serta Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2008-2010”, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar masih rendah,

ketidakmandirian ini dilihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah yang masih sangat kecil yaitu hanya 5,50%.

Pajak Restoran, BBN-KB, dan Pajak Reklame merupakan penerimaan asli daerah yang sangat potensial bagi DKI Jakarta dan dibutuhkan tingkat partisipasi masyarakat Jakarta yang tinggi dalam mempercepat proses penerimaan pajak. DKI Jakarta merupakan ibukota negara serta sentra bisnis negara, untuk itu, diharapkan memiliki tingkat kemandirian daerah yang tinggi dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2012 : 27) berpendapat bahwa Pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Sedangkan Josef Riwu Kaho (2012:149) berpendapat bahwa salah satu tujuan dari desentralisasi adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan publik di Daerah. Selain itu, pada dasarnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, potensi besar yang dimiliki oleh ketiga jenis pajak tersebut harus digali dan dikelola dengan perumusan kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat Jakarta karena dengan adanya partisipasi masyarakat akan kepatuhan sebagai wajib pajak yang berdampak pada meningkatnya tingkat kemandirian daerah sebagai salah satu tolak ukur kinerja keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta.